

**COMMUNICATION STRATEGIES OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT PROTECTION AND MANAGEMENT POLICIES BASED ON LOCAL WISDOM IN TASIKMALAYA REGENCY**

**STRATEGI KOMUNIKASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

Oleh :  
Evi Rosfiantika dan Saleha Rodiah  
Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan  
FIKOM UNPAD  
Email : evi\_rosfiantika@yahoo.co.id

***Abstract.** The purpose of this study was to determine the Communication Strategy Policy on the Protection and Management of Natural Resources and Environment based on local knowledge that can be applied in Tasikmalaya district and can be used as an alternative model of communication policies based on local wisdom. The method used is descriptive method with qualitative approach. Object of research is natural, or natural setting, The data collection techniques used in this study are: observation, interview and literature then Informants selected purposively composed of six (6) persons, namely: Head Section of Supervision Department of Mines and Energy Tasikmalaya District , cultural leaders, community residents, the Village Head Sindangkerta, iron sand material Entrepreneur and Chairman of RT. 01 RW 01 Sindangkerta Cipatujah village. The conclusion is communication policies that do not integrate with the local knowledge and the existence of traditional media in the society is not used to convey the message policies so that policy implementation does not run optimally in accordance with the purpose of government is needed communication strategy policy based on local wisdom in resolving implementation issues iron sand mining policy that is happening today in Tasikmalaya*

***Keyword:** policy communication strategy, local wisdom, environment.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Komunikasi Kebijakan Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup berdasarkan kearifan lokal yang bisa diterapkan di Kabupaten Tasikmalaya dan bisa dijadikan alternatif model komunikasi kebijakan yang berbasis kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitian yang alamiah, atau *natural setting*, Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : observasi, wawancara dan studi pustaka kemudian Informan dipilih secara purposif terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu : kepala Seksi Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya, Tokoh budaya, Warga masyarakat , Kepala Desa Sindangkerta, Pengusaha material pasir besi dan Ketua RT. 01 RW 01 Desa Sindangkerta Cipatujah. Kesimpulan yang diperoleh adalah komunikasi kebijakan yang dilakukan belum diintegrasikan dengan kearifan lokal dan keberadaan media tradisional yang ada di masyarakat tidak dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan kebijakan sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan optimal sesuai dengan tujuan pemerintah maka dibutuhkan strategi komunikasi kebijakan yang berdasarkan kearifan lokal dalam menyelesaikan masalah implementasi kebijakan penambangan pasir besi yang terjadi saat ini di Tasikmalaya

**Kata kunci :** strategi komunikasi kebijakan, kearifan lokal, Lingkungan hidup

## A. PENDAHULUAN

Sumberdaya alam dikuasai oleh Negara maka untuk mengatur dan mengelolanya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat berlaku adil untuk kepentingan bangsa dan Negara bukan untuk kepentingan golongan tertentu.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak ada artinya bila tidak disertai oleh implementasi kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Akhir-akhir ini dalam pengelolaan sumberdaya alam sering terjadi konflik antara pengusaha dengan masyarakat lokal yang pada akhirnya berujung pada konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah, yang biasanya berawal dari aktivitas eksploitasi dan terjadinya degradasi lingkungan. Masyarakat baik pengusaha maupun pemilik dan penduduk sekitar daerah eksploitasi tidak memperoleh kejelasan dan kepastian hukum bagaimana proses pemanfaatan sumberdaya alam tersebut.

Masyarakat tidak lepas dari budaya lokal yang memiliki kearifan lokal yang tinggi. Kearifan lokal diwujudkan dalam nilai-nilai luhur yang tumbuh dimasyarakat warisan falsafah leluhur secara turun temurun, maka harus dijaga dan dikembangkan sehingga menjadi pedoman

dalam melakukan semua aktifitas kehidupan.

Kebijakan pemerintah dalam prosesnya apabila berdasarkan kepada kearifan lokal yang ada di masyarakat bisa mudah dipahami dan dilaksanakan tanpa merasa seperti ancaman dan paksaan untuk masyarakat dalam melaksanakannya.

Terjadi konflik diantara masyarakat yang setuju dan tidak setuju terhadap penambangan pasir besi tersebut. Selain itu konflik juga terjadi antara masyarakat dengan penambang di satu sisi dan disisi lain potensi konflik dengan pemerintah pun besar akibat terjadinya eksploitasi penambangan

Kebijakan-kebijakan pemerintah sudah dikeluarkan untuk mengelola dan mengatur sumberdaya alam dan lingkungan diantaranya UU pertambangan, pelarangan eksploitasi daerah konservasi dan pelestarian wilayah habitat penyu dan lain-lain tetapi dalam pelaksanaannya banyak pihak yang tidak memahami maupun tidak mau tahu mengenai kebijakan-kebijakan tersebut.

Ada yang salah terjadi dalam proses kebijakan pemerintah, salah satunya dalam implementasi kebijakan yang tidak optimal sehingga menimbulkan banyak hambatan dalam pelaksanaannya.

Hambatan-hambatan implementasi kebijakan yang terjadi selama ini adalah dalam melakukan pendekatan ke

masyarakat lebih banyak melakukan pendekatan struktural diantaranya dalam kegiatan sosialisasi maupun pelaksanaan kebijakan dengan alasan keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran.

Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien tanpa banyak mengeluarkan tenaga dan biaya membutuhkan sebuah strategi komunikasi kebijakan yang didasarkan kepada kearifan lokal yang ada. Strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Effendy menyebutkan bahwa strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi (Effendy, 2007 : 32)

Untuk dapat mencegah terjadinya konflik akibat pengelolaan sumber daya alam seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, maka pemerintah dalam merumuskan dan mensosialisasikan kebijakannya harus menggunakan strategi komunikasi yang tepat sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Berdasarkan kebutuhan terhadap pemahaman strategi

komunikasi yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian  
judul: Strategi Komunikasi Kebijakan Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan kearifan lokal.

### 1. Tujuan :

- a. Mengetahui *source* (sumber) yang digunakan dalam strategi komunikasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal
- b. Mengetahui komunikator yang tepat dalam strategi komunikasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal
- c. Mengetahui perencanaan pesan dalam strategi komunikasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal
- d. Mengetahui media komunikasi yang digunakan dalam strategi komunikasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal

## 2. Kerangka Pemikiran

Komunikasi menurut Rogers (dalam Mulyana, 2001: 62) adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Dari definisi tersebut terdapat tujuan yang utama dalam proses komunikasi yaitu perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang sesuai dengan yang diinginkan oleh sumber atau bisa juga disebut komunikator memerlukan strategi komunikasi yang tepat sehingga bisa tercapai tujuan yang diinginkan.

Strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Effendy menyebutkan bahwa strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada

situasi dan kondisi (Effendy, 2007 : 32)

Pace, Petterson dan Burnet (dalam Effendy, 2007 : 32) menyatakan bahwa tujuan sentral kegiatan komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama, pertama adalah *to secure understanding*, memastikan bahwa komunikan mengerti dan menerimanya. Andaikata ia sudah dapat menerima, maka penerimaannya itu harus dibina (*to establish acceptance*). Pada akhirnya kegiatan dimotivasikan (*to motivation action*).

Oleh karena itu dalam rangka menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambatnya serta pengetahuan mengenai komponen-komponen komunikasi, yaitu : 1. Mengenali sasaran komunikasi, dengan memperhatikan factor kerangka referensi serta factor situasi dan kondisi; 2. Pemilihan media komunikasi; 3. Pengkajian tujuan pesan komunikasi; serta 4. Peranan komunikator dalam komunikasi. Dalam strategi

komunikasi, komunikasi harus dikenali dengan cermat dan mendalam, hal tersebut bisa diketahui dari budaya lokal yang ada dan tumbuh dimasyarakat.

Kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-budaya, yang berarti “daya dari budi” Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni (Koentjaraningrat, 1990 : 181).

Budaya menampilkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk perilaku yang berfungsi sebagai model-model bagi tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu dan pada suatu saat tertentu. Oleh karena itu budaya secara pasti

mempengaruhi manusia sejak lahir hingga meninggal dunia.

Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Adapun kearifan budaya lokal ialah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

Kearifan lokal adalah dasar dalam menyusun strategi komunikasi kebijakan, dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

Pemerintah harus berupaya menjaga dan mengembangkan kearifan lokal yang ada di masyarakat sebagai potensi yang besar untuk pembangunan di daerah agar pembangunan akan tepat sasaran dan membawa kemajuan untuk masyarakat. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya yang berpihak kepada masyarakat yang berdasarkan pada kearifan lokal sangat penting, karena pembangunan tidak bisa menghilangkan adat istiadat dan kekayaan budaya pada suatu daerah, tapi sebenarnya, memajukan potensi dan kekayaan yang ada di daerah tersebut.

Kebijakan publik memiliki banyak pengertian, dimana istilah kebijakan atau kebijaksanaan seingkali dipahami sebagai suatu program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, ataupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan terutama kebijakan pemerintah telah menjadi suatu kajian khusus dalam disiplin ilmu pemerintahan. Berikut ini akan diuraikan pengertian kebijakan dan pemerintah.

Kebijakan pemerintah atau *public policy*, Charles O. Jones dalam *An Introduction to Study of Public Policy*, mengemukakan bahwa “*Public policy* adalah hubungan diantara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya”.

Pengertian kebijakan pemerintah berdasarkan pendapat Thomas R. Dye yang dikutip oleh Riant D. Nugroho di dalam bukunya *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, yaitu sebagai berikut: “Kebijakan pemerintah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda,” (2003:3).

Pendapat tersebut dapat diartikan sebagai proses analisis dan politik yang amat kompleks, dimana tidak mengenal awal maupun akhir, serta mempunyai batas-batas yang sesungguhnya tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks disebut sebagai suatu proses pembuatannya itulah

yang selanjutnya akan membuahkan hasil berupa kebijakan pemerintah.

Lingkungan (*environment*) merupakan salah satu faktor penting dalam kesinambungan sebuah sistem. Penekanan terhadap lingkungan (baik internal maupun eksternal) akhir-akhir ini semakin berkembang karena diyakini lingkungan (*environment*) merupakan faktor yang berpengaruh besar dalam berjalannya sebuah sistem.

A. D Hall/ R.E Fagen mengartikan sistem sebagai : “....*a system is a set of object together with relationships*, sementara Russel L Ackoff mendefinisikan sistem sebagai : “.... *a system is any entity, conceptual or physical, wich consist of interdependent parts...*”. Dan banyak lagi berbagai definisi mengenai sistem yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Dari berbagai definisi tersebut, sebagian besar menekankan sistem sebagai suatu kumpulan (keseluruhan) elemen-elemen, yang saling berinteraksi dan menuju ke arah pencapaian tujuan atau sasaran-sasaran tertentu

Lingkungan hidup mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda. Politik pembangunan - terutama-di negara-negara berkembang yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi untuk mengejar kesejahteraan rakyat sering mendatangkan permasalahan di bidang lingkungan.

Permasalahan lingkungan ini biasanya bersumber pada dorongan untuk memanfaatkan secara terus menerus dan berlebihan sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung sumber daya alam tersebut. Untuk mengejar kemakmuran, sumber daya alam dipandang sebagai faktor produksi untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi namun tanpa memperhatikan dampaknya.

Akhir-akhir ini alam di Indonesia banyak mengalami perubahan lingkungan, banyak musibah seperti banjir besar, tanah longsor, satwa yang menyerang manusia. Kerusakan lingkungan alam yang berhubungan dengan

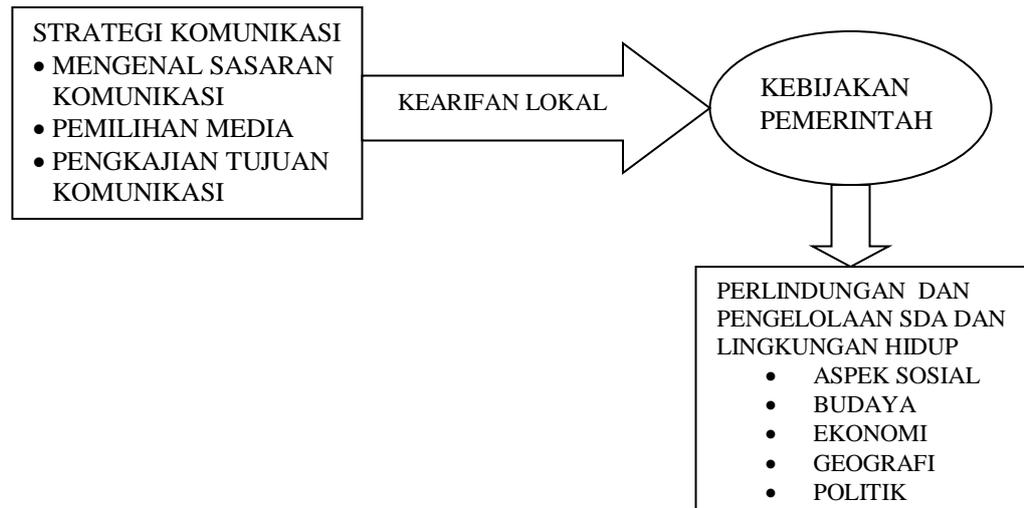
manusia adalah aktivitas-aktivitas industri kapitalis modern. Desakan persaingan di bidang industri yang merupakan prinsip kapitalisme melahirkan berbagai tindakan yang lepas kontrol dalam pendayagunaan atau pengolahan sumber daya alam untuk kebutuhan industri dan dalam penerapan teknologi industri yang tidak mempertimbangkan kondisi alam.

Pengelolaan sumberdaya alam secara lestari penting untuk bisa mengembangkan gaya dan pola hidup yang harmonis dengan kemampuan daya dukung alam. Dalam hubungan ini maka pengembangan teknologi yang harmonis dengan keperluan menyerap tenaga dan peningkatan daya dukung alam sangat penting.

Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan konflik. Konflik ini

menunjukkan bahwa posisi antara negara dengan masyarakat tidak berimbang dan masing masing terlihat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, baik di daerah rural maupun urban. Degradasi lingkungan tersebut harus disadari akan merusak infrastruktur perekonomian dan mengganggu kehidupan sosial.

Adanya degradasi lingkungan yang menyebabkan bencana tersebut, akan bisa diminimalisasi apabila ada kerjasama pengelolaan sumberdaya alam antara Pemerintah dengan perangkatnya, dan masyarakat lokal dengan kearifan dan pengetahuan lokal yang dimilikinya, Semua kemudian diintegrasikan lewat kebijakan yang dikeluarkan dan terlihat dari proses pelaksanaannya



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada pandangan informan tentang suatu masalah. Adapun tujuan dari metode tersebut untuk membuat gambaran secara sistematis, formal, dan aktual mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang akan diteliti lebih terperinci.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian
- b. Wawancara, yaitu cara yang dipergunakan untuk mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan dengan cara bertatap muka langsung dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian
- c. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari, dan menyeleksi pustaka referensi buku,

jurnal dan bahan tertulis lainnya

Dalam penelitian ini pengambilan sumber data dilakukan secara purposif, yaitu dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau sebagai penguasa yang memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi social yang diteliti. (Sugiono, 2010 : 54). Dalam proses penentuan informan, berapa jumlahnya tidak ditentukan sebelumnya, namun berdasarkan pertimbangan informasi.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitannya dengan strategi komunikasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal di Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Informan terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu :

a. Kepala Seksi Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya : Pepen Ucu Atilah, mewakili

pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan

- b. Tokoh budaya : Awa Kartiwa (60 tahun), pekerjaan petani yang selalu mengajak masyarakat memperhatikan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal
- c. Warga masyarakat : Odoy Ruhimat (40 tahun), pekerjaan wiraswasta (pengrajin)
- d. Kepala Desa Sindang Kerta, Cipatujah, Tasikmalaya : Odang Firman (38 tahun), sebagai wakil pemerintah tingkat pertama yang mengetahui seluk beluk tambang pasir besi dan kebudayaan masyarakat sekitar
- e. Pengusaha material dan pasir besi : Eggi (30 tahun), pelaku kegiatan penambangan pasir besi
- f. Ketua RT. 01 RW 01 Desa Sindangkerta Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya : Hendar (40 tahun), wakil anggota masyarakat yang peduli dengan kelestarian alam dan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya.

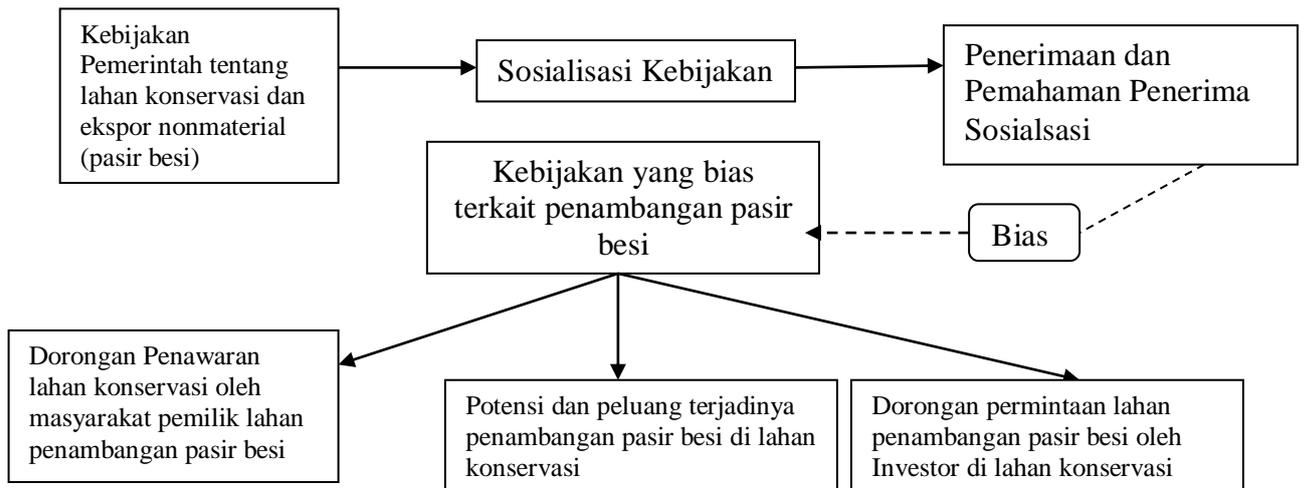
## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan dinas pertambangan kabupaten Tasikmalaya diperoleh informasi bahwa kebijakan penambangan pasir besi tidak disosialisasikan sampai ke masyarakat hanya kepada aparat desa dan pengusaha, hal tersebut mengakibatkan terjadi perbedaan pemahaman tentang kebijakan di masyarakat. Ini dapat diartikan terjadi bias atas kebijakan pemerintah. Dari hasil wawancara dan observasi pada pelaksanaan sosialisasi kebijakan diketahui bahwa sebagian besar warga masyarakat tidak mengetahui kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, walaupun menyadari dan bisa merasakan secara langsung dampak buruknya terhadap kondisi lingkungan

Akibat kebijakan yang bias ini adalah dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif tersebut dapat diminimalisasi agar kegiatan penambangan yang sudah berlangsung dapat dilakukan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam kaitan inilah pemerintah seharusnya dapat mengambil peran melalui peraturan/kebijakan kegiatan

penambangan pasir besi, yang dapat ditempuh dengan merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan hukum yang berkaitan dengan penambangan pasir besi yang berlandaskan pada kearifan lokal agar tidak terjadi krisis dimasyarakat.

Proses penambangan pasir besi yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya secara umum melibatkan perilaku tiga *stakeholder* utama yaitu : (1) Investor/pengusaha yang melakukan penambangan pasir, (2) Pemerintah yang berperan sebagai pengendali penambangan pasir besi, dan (3) Masyarakat pemilik lahan penambangan pasir besi. Interaksi diantara ketiga *stakeholder* tersebut akan sangat menentukan dan mempengaruhi kondisi penambangan pasir besi di Kabupaten Tasikmalaya. Interaksi diantara ketiga *stakeholder* tersebut diperlihatkan dalam Gambar 1 dibawah ini:



**Gambar 1**

**Bagan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penambangan Pasir Besi**

Terjadi sosialisasi kebijakan yang kurang efektif karena menimbulkan perbedaan pemahaman tentang kebijakan yang ada, didukung oleh dorongan kebutuhan ekonomi masyarakat hal tersebut semakin mendorong terjadinya penambangan pasir yang tidak peduli pada kerusakan lingkungan

Sosialisasi kebijakan hanya dilakukan kepada aparat desa dan para investor. masyarakat sebagai khalayak yang harus mengetahui kebijakan tersebut tidak mendapatkan informasi yang memadai, hal itu akan memicu terjadinya krisis di masyarakat.

komunikasi yang efektif berpusat kepada khalayak, dalam menangani

sebuah krisis, lembaga atau kaitannya dengan kondisi penambangan pasir besi ini adalah pemerintah harus mempunyai kepekaan dan pengetahuan tentang pendapat atau keinginan khalayak yaitu masyarakat, dan isu-isu yang membentuk krisis tersebut (Ray, 1999:48).

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan masyarakat dan didukung hasil penelitian dari Nawari Ismail, masyarakat Tasikmalaya masih banyak melakukan beberapa upacara tradisional, seperti upacara hajat laut (2011:166) terlihat dalam upacara tersebut sebagai rasa syukur atas keberkahan dan rejeki yang Tuhan

berikan lewat kekayaan alam yang melimpah salah satu sumbernya dari laut. Masyarakat sangat menjaga dan memelihara lingkungan sebagai warisan leluhur. Kegiatan penambangan pasir besi yang tidak memenuhi aturan akan merusak laut yang menjadi sumber penghasilan masyarakat dalam jangka panjang, semua akan rusak hanya untuk kepentingan dan keuntungan sebentar. Masyarakat akan kembali menyadari hal tersebut jika pemerintah dan semua yang berkepentingan menjadikan kearifan lokal sebagai pengangan dalam melakukan semua aktifitas hidup.

Dibutuhkan peran komunikator yang tepat untuk menyampaikan kebijakan pemerintah mulai dari kalangan pemerintah itu sendiri atau dari masyarakat, syarat menjadi komunikator yang baik adalah mempunyai itikad baik (good intentions), kelayakan untuk dipercaya (trustworthiness), dan kecakapan atau keahlian (Effendy, 1993:126)

Komunikator sosialisasi kebijakan adalah aparat desa dan tokoh masyarakat, mereka dikumpulkan ke dinas dalam sebuah pertemuan yang

hanya dilakukan sekali bila ada kebijakan baru, itupun seringkali kebijakan yang baru tersebut tidak dibagikan secara tertulis tetapi hanya pengarahan saja. Hal tersebut mengakibatkan mereka tidak bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat karena kurang memahami kebijakan tersebut, dari hasil wawancara dengan aparat desa, mereka tidak dibekali pengetahuan yang cukup dan tidak ada pembinaan oleh pemerintah agar bisa menjelaskan dan mensosialisasikan kebijakan yang ada

Dua golongan tokoh masyarakat yang ada ditasik yaitu tokoh agama dan tokoh budaya, kedua golongan tersebut dapat dijadikan komunikator disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan mereka dalam memberikan pemahaman kebijakan kepada masyarakat

Masyarakat tidak teridentifikasi dengan baik, informasi tentang mereka hanya didapatkan pemerintah lewat aparat desa dan tokoh masyarakat, hal tersebut belum bisa mengidentifikasi khalayak secara menyeluruh.

Beberapa kelompok yang ada di masyarakat yaitu kelompok kesenian,

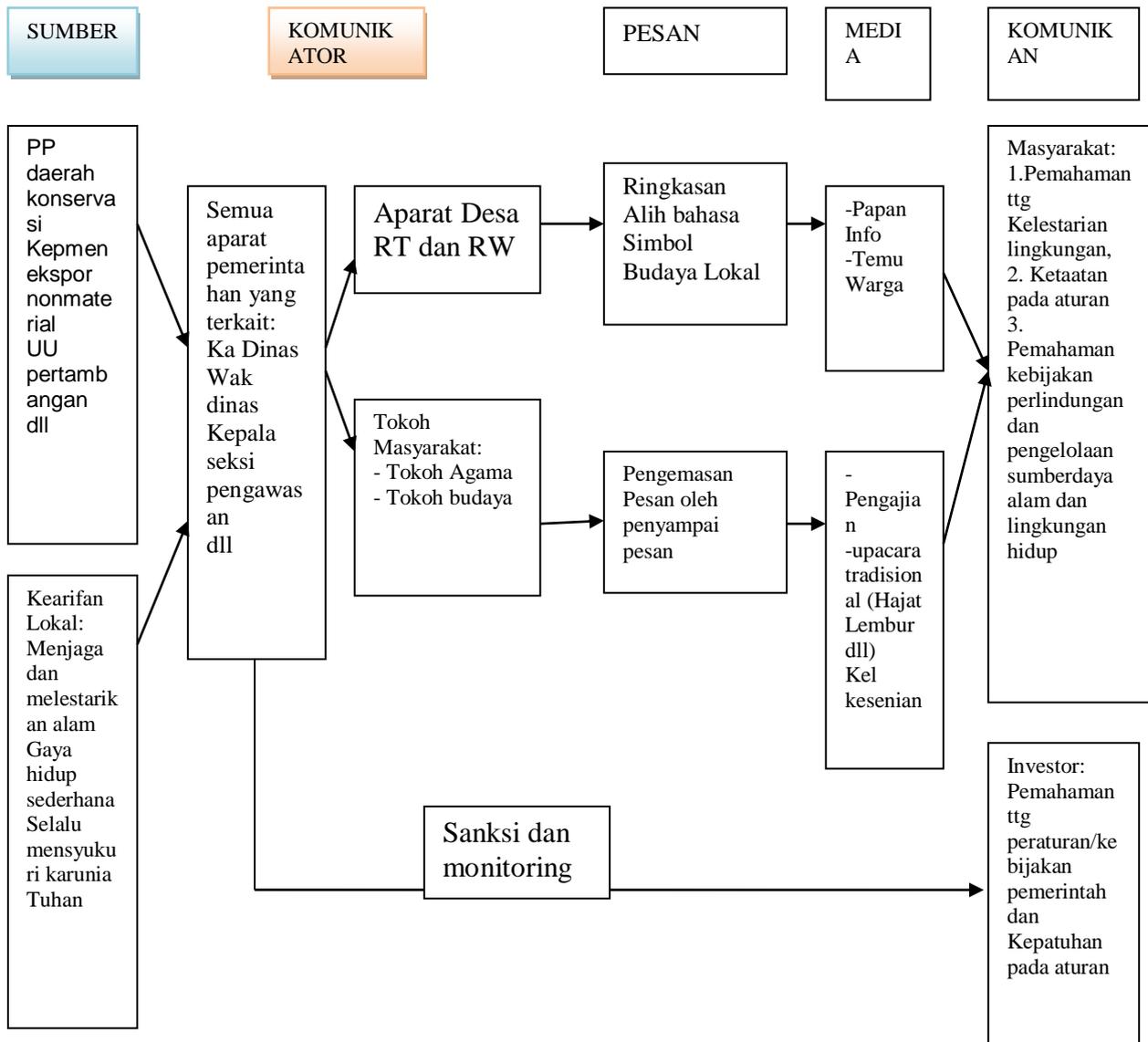
pengajian maupun kelompok yang dibentuk oleh masyarakat lainnya yang ada di masyarakat selain sebagai ajang berkumpul untuk bisa mencurahkan pendapat bisa juga jadi pilihan media untuk mensosialisasikan kebijakan. Sosialisasi kebijakan berbasis komunitas bisa menjadi pilihan, untuk memudahkan dalam menentukan khalayak sasaran karena dalam strategi komunikasi secara makro khalayak perlu dibagi-bagikan lagi menjadi kelompok sasaran (target groups) sehingga lebih bisa dipantau dan diarahkan sesuai dengan tujuan komunikasi (effendy, 1993:128)

Tradisi Upacara Hajat Lembur, Upacara Hajat Laut atau kini berubah nama menjadi Sukuran Laut (dalam rangka islamisasi budaya), dan wayang golek. Ketiga budaya lokal tersebut hidup dan berkembang di masyarakat Tasik. Akan tetapi media-media budaya baru lain sebetulnya ada, seperti, komunitas-komunitas kemasyarakatan yang merupakan produk tradisi modern dan pos modern,

kemudian setiap desa yang memiliki wilayah pesisir terdapat kelompok penggerak pariwisata (KOMPEPAR)

Kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk ada DANGIANG SUNDA PAKIDULAN (DSP) yang bergerak dalam bidang pemeliharaan tradisi khas Sunda Pakidulan Priangan memiliki kegiatan rutin yaitu festival budaya khas pakidulan setahun sekali dan lain-lain. Selain itu forum warga Sindangkerta, komunitas ini bergerak dalam bidang peduli lingkungan, terlahir karena lingkungan pantai selatan menjadi area tambang pasir pantai (biji besi) yang merusak lingkungan

Peneliti merancang sebuah model strategi komunikasi kebijakan berdasarkan temuan di lapangan dan studi literatur. Model tersebut dijabarkan berdasarkan komponen-komponen komunikasi yang diintegrasikan dengan kearifan dan budaya lokal yang ada dimasyarakat tasikmalaya. diperlihatkan dalam bagan dibawah ini:



**Gambar 2.**

**Strategi Komunikasi Kebijakan berdasarkan kearifan lokal**

**C. SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *source* (sumber) yang digunakan dalam strategi komunikasi

kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Nilai-nilai luhur

tersebut dapat terlihat dari falsafah dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat

2. Komunikator yang tepat dalam strategi komunikasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal adalah aparat pemerintah yang didukung oleh tokoh masyarakat dan tokoh budaya, melalui pembinaan yang terus menerus dilakukan sehingga semua komunikator dapat memahami dan dapat mengemas pesannya sesuai dengan keahliannya masing-masing
3. Perencanaan pesan dalam strategi komunikasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal melalui pengalihan kode bahasa ke dalam bahasa sunda kemudian dokumen kebijakan disederhanakan dalam sebuah kutipan kebijakan yang masih relevan dengan pengetahuan kebijakan tersebut setelah itu

diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur yang ada dimasyarakat

4. Media komunikasi yang digunakan dalam strategi komunikasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal adalah media tradisional yang masih digunakan dan berkembang di masyarakat.

Kemudian saran yang peneliti ajukan setelah penelitian ini selesai dilakukan adalah:

1. Nilai-nilai luhur yang ada dimasyarakat harus dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah karena merupakan modal berharga yang dapat mendukung dan menunjang pembangunan. Salah satunya dengan cara dikeluarkannya peraturan daerah yang dapat secara langsung dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait dalam melakukan pembinaan melalui program-program yang terus berkelanjutan.
2. Tokoh agama dan budaya yang ada di masyarakat dilibatkan dalam proses kebijakan yang

dilakukan oleh pemerintah misalnya melalui pertemuan rutin dan pelatihan mengenai cara sosialisasi kebijakan-kebijakan yang ada.

3. Dokumen kebijakan yang ada dialihkan dalam sebuah kutipan kebijakan yang lebih sederhana tetapi masih sesuai dan relevan dengan kebijakan aslinya. Kutipan tersebut dibagikan ke pihak-pihak yang terkait.
4. Media tradisional harus dibina dan didukung keberadaannya melalui kebijakan pemerintah daerah dan pembinaan secara langsung dari dinas-dinas terkait.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James A. 1994. *Public Policy Making, An Introduction*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bungin, Burhan, 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- Dunn, William N. Muhadjir Darwin. (peny).1995. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Handinita Graha Widya.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. Elex Media Komputindo
- Islamy, Irfan, 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail, Nawari, 2010. *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung : Lubuk Agung
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung; Mandar Maju
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- Parsons, Wayne. 2001.*Public Policy. Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*.
- Ray, Sally J, 1999. *Strategic Communication in Crisis Management (Lessons from The Airlines Industry)*. United States of America : Quorum Books
- Solichin Wahab. 1997. *Analisis Kebijakanaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Suryaningrat. *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia.

Winarno, Budi, 2002, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.